

## 2



oleh:

**Ahmad Zuhdi Allam**  
(Asisten Akademik Kelompok  
Keahlian Sejarah, Teori, dan Kritik  
Arsitektur ITB)

**M**useum sejatinya tidak bisa lepas dari masyarakat. Menurut *International Council of Museums (ICOM)*, museum adalah lembaga permanen non-profit yang terbuka untuk umum guna melayani dan membantu perkembangan masyarakat dengan mengumpulkan, merawat, meneliti, mengomunikasikan, dan memamerkan pusaka umat manusia dan lingkungannya baik yang benda maupun nonbenda untuk tujuan pendidikan, pembelajaran, dan kesenangan (ICOM, 2007).

Menurut PP. No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Kedua pengertian di atas mencantumkan kata “masyarakat” secara eksplisit. Museum diamanatkan untuk berperan sebagai pelayan/pengembang masyarakat atau penyebar ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

Kini, hubungan antara museum dan masyarakat menjadi semakin kompleks karena, setidaknya, tiga hal:

**Pertama,** perkembangan intelektual-filosofis museum. Museum hari ini telah berkembang dari yang mulanya berfokus pada koleksi (museum tradisional) beralih fokus kepada fasilitas dan arsitekturnya (museum modern), lalu menjadi museum yang fokus pada masyarakatnya (museum *post-modern*) (Marstine, 2006; Magetsari, 2016). Peran masyarakat kini telah makin beragam, bukan hanya sebagai

## MUSEUM DAN SEKILAS PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

audiens, tapi juga sebagai kolaborator museum (Wronska-Friend, 2012), bahkan terlibat dalam perencanaan museum (Simon, 2010).

um di Indonesia) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Masyarakat hari ini lebih bebas untuk berpendapat karena era Reformasi



Keterangan: Museum Art-Prenuer Ciputra mengangkat tema kesenian berkonsep one stop service art venue. Ruang 2D menjadi salah satu gebrakan baru menikmati pameran lukisan.  
Sumber: <https://housingestate.id/>

**Kedua,** perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti internet, teknologi seluler, dan web 2.0 telah membuat karakter masyarakat yang berbeda dengan masa lalu (Kelly, 2010). Informasi yang dulu hanya bisa ditemukan di perpustakaan dan museum kini bisa ditemukan dalam situs internet melalui gawai setiap orang. Begitu pun sebaliknya, setiap orang kini bisa punya akses ke penjuru dunia untuk memberikan informasi. Tak syak, hubungan masyarakat dan museum terpengaruh karena hal ini.

**Ketiga,** khusus di Indonesia, perubahan ketatanegaraan dari Era Orde Baru ke Era Reformasi juga berpengaruh, baik kepada masyarakat maupun kepada museum. Tidak bisa dipungkiri bahwa museum adalah bagian tidak terpisahkan dari pendidikan publik dan banyak museum yang dimiliki oleh pemerintah (288 museum dari 435 muse-

masi menekankan pentingnya hak asasi manusia (HAM) di atas kepentingan pemerintah. Otonomi daerah membuat adanya pembagian wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Reformasi juga menekankan prinsip *good governance* dan transparansi dimana masyarakat bisa tahu dan terlibat lebih banyak dalam urusan pemerintahan, termasuk museum milik pemerintah (Yulianto, 2016).

Melihat tuntutan zaman yang sedemikian kompleks, museum-museum di Indonesia perlu bertransformasi menjadi lembaga yang adaptif dan inklusif.

Dengan demikian, alih-alih fokus pada pengembangan fasilitas fisik museum, pemerintah dan pemilik museum perlu fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan organisasi museum. Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2018 menunjuk-

kan bahwa titik kritis pengembangan museum di Indonesia adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi museum yang secara terus-menerus perlu dilakukan (Allam, 2018).

Upaya pemerintah mengurai permasalahan di atas sebenarnya telah ada dengan menyelenggarakan pendidikan formal permuseuman pada 2008. Sayangnya, dari tiga program pendidikan khusus kajian museum telah didirikan di tiga universitas di Indonesia, hanya dua universitas yang masih membuka program tersebut pada 2018. Kedua program itu pun masih menjadi peminatan khusus dalam program studi arkeologi, sehingga upaya pemerintah dalam peningkatan kapasitas SDM di bidang permuseuman terkesan serba tanggung.

Pemerintah juga telah menerbitkan publikasi periodik semi ilmiah berjudul "Museografia" pada tahun 2007 untuk menumbuhkembangkan wacana dalam bidang permuseuman. Sayangnya, berdasarkan pengalaman pribadi penulis, tidak ada satu lembaga pun, termasuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang memiliki koleksi lengkap "Museografia". Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai keseriusan pemerintah dalam pengembangan bidang permuseuman.

Kebijakan pemerintah saat ini pun secara umum belum bisa mendorong transformasi museum. Sistem birokrasi saat ini masih terlalu kaku bagi sebagian besar museum milik pemerintah. Upaya agar museum mengadopsi sistem kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU) yang lebih fleksibel bagaikan jalan di tempat. Per awal 2020, hanya satu museum milik pemerintah yang mengadopsi sistem BLU. Museum Nasional dan Galeri Nasional yang didorong menjadi BLU sejak 2017 belum juga menerapkan sistem ini. Jika sumber daya manusia dan organisasi adalah momok paling besar bagi museum pemerintah, maka momok paling besar bagi museum milik swasta/

masyarakat adalah pendanaan. Saat ini, belum ada sistem insentif yang komprehensif bagi masyarakat yang berkontribusi bagi museum dan institusi kebudayaan secara umum. Sistem insentif ini menjadi instrumen penting dalam urusan pemajuan kebudayaan di berbagai negara.

Di sisi lain, PP. RI No. 66 Tahun 2015 tentang Museum tidak cukup berkontribusi dalam pemecahan problematika permuseuman di Indonesia. Misalnya, dalam peraturan ini kurator diposisikan sebagai tenaga teknis museum, bukan tenaga ahli. Selain itu, peraturan ini juga terkesan "buta dengan skala museum". Pada hakikatnya, museum besar dengan beragam tipe koleksi berbeda dengan museum kecil dengan tipe koleksi yang sangat spesifik, meski peran dalam masyarakat kedua tipe museum sama.

Pemaparan kondisi permuseuman di atas perlu bukanlah penjabaran permasalahan, melainkan identifikasi ladang pengembangan yang perlu dan bisa digarap oleh para pemangku kepentingan dunia permuseuman. Permuseuman sejatinya bersifat multidisiplin yang melibatkan banyak pihak dari banyak bidang. Di dalam museum, setidaknya ada 8 (delapan) fungsi museum: penyimpanan koleksi, pemeliharaan koleksi (konservasi), penelitian, pameran, pendidikan, pengelolaan (manajemen), hubungan masyarakat, dan pemasaran (Veselko, 2011). Dengan demikian, siapa pun bisa berkontribusi dalam dunia permuseuman asal memiliki hasrat (*passion*) dalam bidang pendidikan masyarakat dan pelestarian ilmu pengetahuan.

Potensi pengunjung museum juga diperkirakan akan terus meningkat. Perbaikan taraf hidup masyarakat Indonesia secara umum membuat kebutuhan sekunder masyarakat menjadi semakin penting.

Dengan demikian, potensi kunjungan museum sebagai sarana hiburan edukatif akan terus meningkat ke depan. Kehadiran museum swasta seperti Muse-

um *Modern and Contemporary Art in Nusantara* (MACAN) yang berdiri tahun 2017 dan Museum *Art-Prenuer* Ciputra yang berdiri tahun 2016 di Jakarta menunjukkan bahwa kebutuhan akan museum cukup *viable* secara ekonomi dan telah muncul keinginan para konglomerat untuk berinvestasi dalam bidang pemanfaatan produk budaya. Belum lagi jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia yang tiap tahun meningkat.

Jika daya tarik wisata alam dan budaya yang selama ini mendominasi tujuan wisatawan telah jenuh, maka museum bisa menjadi alternatif agar bisa mempertahankan tren peningkatan jumlah wisman.

Dalam pengamatan penulis, masih sedikit orang Indonesia yang belajar secara khusus tentang kajian museum atau museologi. Jika permuseuman adalah bidang multidisiplin maka museologi adalah benang merah yang mengikat banyak bidang di dalamnya. Paradigma museologi membuat duduk perkara permuseuman menjadi lebih jelas. Kekurangan cendekiawan museologi membuat wacana permuseuman menjadi kurang berbobot dan kurang kuat dalam arus utama pengembangan kebijakan permuseuman: masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh dunia permuseuman di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Akbar, Ali. 2010. *Museum di Indonesia: Kendala dan Harapan*. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- Allam, Ahmad Zuhdi. 2018. "Perspektif Museologi dalam Kegiatan Kuratorial pada Museum-Museum di Jakarta". Tesis. Depok: Universitas Indonesia.
- Bangun, Elmanem. 2000. "Orang-orang Museum". Tesis. Depok: Universitas Indonesia.
- International Council of Museums. 2007. *ICOM Statutes* (English version). Paris: Penulis.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. *Statistik Kebudayaan 2019*. Jakarta: Penulis.
- Kelly, Lynda. 2010. "How Web 2.0 is Changing the Nature of Museum Work", dalam *Curator* vol. 53, no. 4. Hal 405-410.
- Magetsari, Noerhadi. 2016. *Perspektif Arkeologi Masa Kini dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Marstine, Janet. 2006. "Introduction", dalam - Janet Marstine (ed.) *New Museum Theory and Practice: An Introduction*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.
- Simon, Nina. 2010. *The Participatory Museum*. Santa Cruz: Museum 2.0.
- Veselko, Irena. 2011. "What are the core competencies needed in a museum? A view from Slovenia", dalam Jane A. Legget (ed.) *Staff and Training in Regional Museum*. Paris: - ICOM-ICR, ICOM-ICTOP, dan Regional Museum Murska Sobota.
- Wronska-Friend, Maria. 2012. "Why Haven't We Been Taught All That At School? Crosscultural Community Projects in North Queensland, Australia", dalam *Curator* vol. 55, no. 1. Hal 3-19.
- Yulianto, Kresno. 2016. *Di Balik Pilar-pilar Museum*. Jakarta Selatan: Wedatama Widya Sastra.